



# Laporan Tahunan

Layanan Informasi  
Publik Tahun

# 2022

**Badan Kebijakan Fiskal**

## Daftar Isi

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	3
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	3
2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik .....	5
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik .....	5
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	5
D. Keberatan .....	6
E. Sengketa .....	6
F. Kendala .....	6
G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	7

## A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 ditetapkan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal.

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID di Lingkungan BKF, telah ditetapkan Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF dan satu Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF sebagai anggota Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor Kep-1/SJ/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2022. BKF senantiasa berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan dalam melakukan pelayanan informasi publik. Koordinasi ini meliputi pembahasan terkait tanggapan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi dan klasifikasi informasi serta *sharing knowledge*.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

#### a. Ruang Layanan Terpadu



BKF memiliki ruang layanan terpadu yang digunakan untuk melayani pemohon informasi publik. Ruang ini berlokasi di Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2 (Jln. Dr Wahidin Raya No.1, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat).

b. QR Code

BKF menyediakan QR Code menuju laman website layanan PPID sehingga memudahkan pemohon informasi publik yang datang langsung ke BKF.



## Layanan Informasi



[fiskal.kemenkeu.go.id/ppid](https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid)

c. Telepon

Pemohon informasi publik dapat menghubungi nomor 021-34833486 untuk menanyakan informasi terkait layanan informasi publik di BKF.

d. Email

*Email* yang digunakan BKF dalam melakukan pelayanan informasi publik yaitu [ppid.bkf@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.bkf@kemenkeu.go.id)

e. Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan

BKF menggunakan SIPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik melalui aplikasi e-PPID atau tautan [e-ppid.kemenkeu.go.id](https://e-ppid.kemenkeu.go.id)

f. Media Sosial

Media sosial BKF yaitu Instagram (@bkfkemenkeu), Twitter (@bkfkemenkeu), Facebook (Badan Kebijakan Fiskal), dan Youtube (BKF Kemenkeu).

g. Situs

Pemohonan informasi publik dapat mengunjungi situs <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid> untuk memperoleh informasi terkait layanan informasi publik BKF.

## 2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugasnya di tahun 2022, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku PPID Tingkat I BKF, dibantu oleh Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF dan satu Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF. Selain itu, proses pemenuhan permintaan informasi publik juga didukung oleh unit-unit eselon II di lingkungan BKF.

ditambahin: namun demikian, dalam implementasinya, proses pemenuhan per mintaan informasi publik selalu didukung oleh unit-unit teknis di lingkungan BKF.

## 3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan informasi publik selama tahun 2022 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKF 2022 dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Komunikasi Publik.

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2022, BKF menerima 12 permohonan informasi. Dari 12 permohonan tersebut, terdapat 2 permohonan yang dikabulkan sepenuhnya, 1 pemohon yang dikabulkan sebagian dan 9 informasi yang tidak diberikan dengan alasan informasi yang diminta tidak dikuasai. Rincian pelayanan informasi publik BKF selama tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 - Pelayanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Tidak Diberikan	Keberatan
			Sepenuhnya	Sebagian			
Januari	2	10	1	0	0	1	1
Februari	0	0	0	0	0	0	0
Maret	1	4	0	0	0	1	0
April	2	11,5	1	1	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	3	7	0	0	0	3	0
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	1	5	0	0	0	1	0
November	1	13	0	0	0	1	0
Desember	2	12,5	0	0	0	2	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>5,25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

## D. Keberatan

Sepanjang tahun 2022, terdapat 1 (satu) keberatan yang diajukan kepada BKF. Alasan pemohon mengajukan keberatan yaitu karena tidak dipenuhinya permintaan informasi. Menanggapi hal tersebut, perangkat PPID BKF bekerja sama dengan perangkat PPID Kemenkeu dalam merumuskan tanggapan atas keberatan tersebut agar selanjutnya tidak menimbulkan sengketa informasi publik. Dalam tanggapan keberatan dimaksud, BKF menyampaikan bahwa data yang diminta tidak tersedia di BKF melainkan dibawah penguasaan Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, pemohon diarahkan untuk mengajukan permohonan informasi ke PPID unit bersangkutan.

## E. Sengketa

Pada tahun 2022, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada BKF.

## F. Kendala

BKF menghadapi beberapa kendala dalam mengelola layanan informasi publik selama tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi permintaan informasi publik, petugas layanan informasi publik di Bagian Informasi dan Komunikasi Publik telah melakukan koordinasi dengan unit eselon II BKF selaku pemilik informasi/data. Meskipun demikian, belum ada Person in Charge (PIC)

pada tiap-tiap unit eselon II BKF yang bertanggung jawab terhadap layanan informasi publik, sehingga penyelesaian permintaan informasi publik membutuhkan waktu yang relatif lama.

2. Informasi pada website dan media sosial BKF belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh, melainkan masih terpusat di Jakarta yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

City	Acquisition
	Users
	<b>1.112.032</b> % of Total : 100,00% (1.112.032)
Jakarta	<b>396.096</b> (31,70%)
Surabaya	<b>95.751</b> (7,66%)
(not set)	<b>73.055</b> (5,85%)
Bandung	<b>51.975</b> (4,16%)
Semarang	<b>47.655</b> (3,81%)
Medan	<b>33.598</b> (2,69%)
Tangerang	<b>28.052</b> (2,24%)
Bekasi Regency	<b>27.240</b> (2,18%)
Depok	<b>25.349</b> (2,03%)
Makassar	<b>24.771</b> (1,98%)

## G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dengan memperhatikan kendala pengelolaan pelayanan informasi publik serta hasil monitoring dan evaluasi PPID BKF 2021, disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Menerbitkan surat keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal terkait penugasan pengelolaan layanan informasi publik PPID Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal yang melibatkan Kepala Bidang Program pada masing-masing Unit Eselon II BKF.

Mengadakan rapat koordinasi layanan informasi dan *workshop* terkait keterbukaan informasi publik dengan masing-masing Unit Eselon II BKF.

Melakukan *redesain* dan pemutakhiran secara berkala *website* BKF agar mampu menyajikan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh pengguna *website*.

Membuat konten *website* dan media sosial dengan bahasa yang lebih sederhana yang dilengkapi dengan Juru Bahasa Isyarat agar dapat memudahkan teman disabilitas untuk memahami informasi yang disampaikan.

Januari 2023,

Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal

selaku

PPID Tingkat I BKF

Dini Kusumawati